

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, serta berada di kawasan Cincin Api Pasifik. Letak tersebut menjadikan Indonesia rentan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Selain faktor geologi, kondisi iklim tropis yang dimiliki Indonesia, ditambah dengan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem akibat perubahan iklim global, turut memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir rob, dan kekeringan.

Sejalan dengan kondisi tersebut, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir lebih dari 95% kejadian bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan (BNPB, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Indonesia tidak sepenuhnya dapat dihindari, sehingga diperlukan pengelolaan yang terencana melalui kebijakan yang tepat.

Tabel 1. 1
Jumlah Kejadian per Jenis Bencana Indonesia 2023

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
Banjir	1.255
Cuaca Ekstrem	1.261
Tanah Longsor	591
Karhutla	2.051
Gempa Bumi	31
Kekeringan	174
Gelombang Pasang dan Abrasi	33
Erupsi Gunung Api	4

Sumber: Buku Data Bencana Indonesia 2023, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, kejadian bencana di Indonesia cenderung didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor dengan jumlah kejadian yang relatif tinggi dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Bencana geologi seperti gempa bumi dan erupsi gunung api memiliki jumlah kejadian yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar bencana di Indonesia dipengaruhi oleh faktor cuaca dan lingkungan.

Penanggulangan bencana di Indonesia memiliki tantangan tidak hanya terletak pada tingginya resiko alamiah, namun juga pada aspek keberjalanan program yang belum sepenuhnya optimal. Keberhasilan penanggulangan bencana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah, non-pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan akan membutuhkan sinergi yang kuat antar satu sama lain sehingga meningkatkan ketangguhan komunitas menghadapi bencana. Penguatan sistem manajemen kebencanaan harus dilakukan dengan memperbaiki koordinasi, memperjelas peran masing-masing pihak, serta meningkatkan literasi dan

kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko bencana. Keberhasilan kebijakan di lapangan dapat dicapai apabila ada kolaborasi yang efektif, didukung oleh *leadership* yang kuat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Implementasi strategi ini diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap bencana (Khafian, 2023).

Sebagai wujud tanggung jawab negara dalam upaya mengurangi risiko bencana, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Berdasarkan kebijakan tersebut BNPB mengembangkan strategi penguatan kapasitas daerah dan masyarakat dengan menginisiasi Program Kelurahan Tangguh Bencana yang mulai diterapkan tahun 2012. Program ini merupakan sistem peringatan dini Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Bencana. Program ini bertujuan membentuk kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri dalam mengenali ancaman bencana, merencanakan langkah mitigasi serta mengorganisir sumber daya dimiliki dalam upaya mengurangi potensi risiko bencana di lingkungannya yang dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing wilayah sebagai pelaksana program (Ramadhan, Maruapey, Rusliandy, 2025).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab menyelenggarakan

penanggulangan bencana di wilayah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pembentukan BPBD didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang telah menggantikan kelembagaan sebelumnya, yakni Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat kabupaten/kota yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kejadian bencana di berbagai wilayah di Indonesia, peran BPBD menjadi semakin penting dalam mengoordinasikan upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah. Selain itu, secara nasional, Jawa Tengah juga termasuk dalam tiga besar provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak. Kondisi ini tercermin dari tingginya jumlah kejadian bencana yang tersebar di berbagai provinsi dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Salah satu provinsi yang memiliki tingkat kejadian bencana cukup tinggi adalah Jawa Tengah, yang secara nasional termasuk dalam tiga besar provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sehingga memerlukan upaya penanggulangan bencana yang terstruktur dan berkelanjutan, terutama melalui penguatan ketangguhan masyarakat di tingkat lokal. Berikut disajikan data 10 Provinsi di Indonesia dengan jumlah kejadian bencana alam terbanyak di Indonesia.

Gambar 1. 1

10 Provinsi dengan Jumlah Kejadian Bencana Alam Terbanyak di Indonesia 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, diketahui bahwa provinsi dengan jumlah kejadian bencana alam terbanyak di Indonesia didominasi oleh wilayah Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan jumlah kejadian mencapai 844, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan total 629 kejadian. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Selatan menempati posisi ketiga dengan jumlah kejadian sebanyak 539.

Tingginya intensitas kejadian bencana di Jawa Tengah menegaskan pentingnya penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana, khususnya melalui pendekatan berbasis komunitas. Pemerintah daerah melalui BPBD memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan upaya mitigasi,

kesiapsiagaan, hingga penanganan pascabencana di seluruh kabupaten/kota. Namun demikian, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan seperti perbedaan kapasitas antar wilayah, keterbatasan sumber daya, serta belum meratanya tingkat kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh perencanaan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal.

Tabel 1. 2

Jumlah Kejadian Bencana Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah 2023

No	Nama Kab/Kota	Jumlah Kejadian
1.	Kabupaten Klaten	57
2.	Kabupaten Sragen	51
3.	Kabupaten Cilacap	45
4.	Kota Magelang	44
5.	Kota Semarang	40
6.	Kabupaten Jepara	38
7.	Kabupaten Wonogiri	33
8.	Kabupaten Temanggung	31
9.	Kabupaten Banyumas	26
10.	Kabupaten Semarang	22
11.	Kabupaten Sukoharjo	21
12.	Kabupaten Kudus	19
13.	Kabupaten Grobogan	17
14.	Kabupaten Wonosobo	16
15.	Kabupaten Karanganyar	16
16.	Kabupaten Kendal	16
17.	Kabupaten Blora	15
18.	Kabupaten Banjarnegara	14
19.	Kabupaten Purbalingga	12
20.	Kabupaten Demak	11
21.	Kabupaten Batang	11
22.	Kabupaten Tegal	11
23.	Kabupaten Brebes	11
24.	Kabupaten Kebumen	10
25.	Kabupaten Rembang	10
26.	Kabupaten Pemalang	9
27.	Kabupaten Purworejo	8
28.	Kabupaten Pati	7
29.	Kota Salatiga	6
30.	Kota Pekalongan	6
31.	Kabupaten Pekalongan	5
32.	Kota Surakarta	5
33.	Kabupaten Boyolali	44
34.	Kota Tegal	2
35.	Kota Magelang	1

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, jumlah kejadian bencana di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 menunjukkan distribusi yang bervariasi. Kabupaten Klaten tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kejadian bencana tertinggi yaitu sebanyak 57 kejadian, diikuti oleh Kabupaten Sragen sebanyak 51 kejadian dan Kabupaten Cilacap sebanyak 45 kejadian. Sementara itu, Kota Semarang menempati posisi lima besar dengan jumlah 40 kejadian bencana. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang termasuk wilayah dengan tingkat kejadian bencana yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya di Jawa Tengah. Di sisi lain, beberapa daerah seperti Kota Tegal dan Kota Pekalongan memiliki jumlah kejadian bencana yang relatif lebih rendah.

Tingginya jumlah kejadian bencana tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana yang efektif dan terkoordinasi. Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan serta mengoordinasikan berbagai program penanggulangan bencana di daerah, termasuk Program Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) di Kota Semarang.

Program Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) yang diimplementasikan oleh BPBD memiliki sasaran utama pada kelurahan dan masyarakat melalui pelatihan serta pembentukan Forum Kelurahan Tangguh Bencana. Program ini dibangun atas prinsip kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan menempatkan kelurahan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Melalui program tersebut, diharapkan terbentuk jejaring

kerja sama antara BPBD, aparat kelurahan dan masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Berikut data jumlah kasus bencana alam di kota Semarang periode 2019-2024.

Tabel 1.3

Jumlah Kejadian Bencana Kota Semarang 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Kejadian
1.	2019	371
2.	2020	266
3.	2021	449
4.	2022	293
5.	2023	190
6.	2024	289

Sumber: Data Kebencanaan BPBD Kota Semarang

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa Kota Semarang termasuk wilayah yang memiliki tingkat potensi kerentanan terhadap bencana alam. Situasi tersebut menunjukkan perlunya upaya mitigasi bencana yang dilakukan secara cepat dan tepat. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah dengan menjalankan kebijakan Program Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelurahan agar mampu menghadapi dan menangani potensi bencana secara mandiri.

Program Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) menjadi salah satu kebijakan strategis yang diinisiasi pemerintah untuk memperkuat ketangguhan masyarakat di tingkat paling bawah. Pemilihan program ini sebagai objek penelitian didasarkan pada urgensi yang sangat tinggi. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehari-hari.

Sebagai tulang punggung penanggulangan bencana, kelurahan memiliki posisi yang ideal untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana karena mampu menjangkau langsung unit-unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Pendekatan berbasis keluarga ini sangat penting karena kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan setiap keluarga untuk mengenali risiko, menyusun rencana mitigasi, dan melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan dari pemerintah datang.

Secara yuridis, pelaksanaan Program KATANA merupakan keharusan. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana secara tegas mewajibkan pemerintah daerah untuk membentuk dan mengembangkan kelurahan tangguh bencana sebagai bagian integral dari sistem penanggulangan bencana nasional. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menempatkan pemerintah daerah dan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengurangan risiko bencana. Program KATANA bukan hanya pilihan kebijakan, melainkan kewajiban hukum yang harus dijalankan secara serius oleh setiap daerah, termasuk Kota Semarang.

Keberhasilan program ini sangat bergantung evaluasi program transparansi dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, serta akuntabilitas dalam pelaporan dan evaluasi program. Sejalan dengan hal tersebut, program Katana tidak hanya berorientasi pada upaya teknis mitigasi. Namun diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Katana untuk menilai sejauh mana program

telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Di Kota Semarang, Program KATANA telah dilaksanakan sejak tahun 2017 oleh BPBD Kota Semarang. Hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 35 kelurahan telah membentuk struktur Forum KATANA. Namun, meskipun program ini telah berjalan beberapa tahun, masih terdapat ketidakmerataan implementasi antar kelurahan. Kondisi ini menjadikan evaluasi terhadap Program KATANA sangat penting dilakukan. Evaluasi tidak hanya diperlukan untuk melihat capaian program, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu membangun kemandirian masyarakat mulai dari tingkat keluarga hingga kelurahan dalam menghadapi ancaman bencana. Berikut daftar kelurahan yang sudah membentuk KATANA di Kota Semarang.

Gambar 1. 2
Daftar Kelurahan Tanguh Bencana Kota Semarang

DAFTAR KATANA KOTA SEMARANG

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	PEMBENTUKAN	ANCAMAN BENCANA	SUMBER DANA
1	TINJOMOYO	BANYUMANIK	2018	LONGSOR	APBD
2	JABUNGAN	BANYUMANIK	2022	TANAH LONGSOR	APBD
3	LEMPONGSARI	GAJAHMUNGKUR	2020	TANAH LONGSOR	APBD
4	GAJAHMUNGKUR	GAJAHMUNGKUR	2022	TANAH LONGSOR	APBD
5	KALIGAWA	GAYAMSARI	2017	BANJIR & KEBAKARAN	APBD
6	TRIMULYO	GENUK	2018	BANJIR & ROB	APBD
7	KARANGROTO	GENUK	2020	BANJIR	APBD
8	GEBANGSARI	GENUK	2022	BANJIR	APBD
9	SUKOREJO	GUNUNGPATI	2017	LONGSOR / TANAH GERAK & KEBAKARAN	APBD
10	WONOSARI	NGALIYAN	2017	BANJIR	APBN
11	GONDORIYO	NGALIYAN	2017	BANJIR	APBN
12	KALIPANCUR	NGALIYAN	2017	BANJIR & LONGSOR	APBN
13	BERINGIN	NGALIYAN	2018	BANJIR	APBD
14	WATES	NGALIYAN	2018	BANJIR	APBD
15	TAMBAKAJI	NGALIYAN	2022	BANJIR	APBD
16	MUKTIHARHO KIDUL	PEDURUNGAN	2020	BANJIR	APBD
17	KROBOKAN	SEMARANG BARAT	2020	BANJIR	APBD
18	KEMBANGARUM	SEMARANG BARAT	2022	TANAH LONGSOR	APBD
19	RANDUSARI	SEMARANG SELATAN	2017	LONGSOR	APBN
20	LAMPER LOR	SEMARANG SELATAN	2022	BANJIR	APBD
21	KEMJEN	SEMARANG TIMUR	2017 & 2023	BANJIR & ROB	APBD
22	TANJUNGMAS	SEMARANG UTARA	2018	BANJIR & ROB	APBD
23	MANGUNHARJO	TEMBALANG	2017	BANJIR BANDANG & ROB	APBD
24	ROWOSARI	TEMBALANG	2017 & 2023	BANJIR & KEKERINGAN	APBD
25	METESEH	TEMBALANG	2020	BANJIR	APBD
26	TANDANG	TEMBALANG	2022	TANAH LONGSOR	APBD
27	MANGKANG KULON	TUGU	2017	BANJIR & ROB	APBD
28	MANGKANG WETAN	TUGU	2017	BANJIR BANDANG & ROB	APBD
29	RANDUGARUT	TUGU	2021	BANJIR	APBD
30	TUGUREJO	TUGU	2022	BANJIR	APBD
31	SAWAH BESAR	GAYAMSARI	2023	BANJIR	APBD
32	MUKTIHARJO LOR	GENK	2023	BANJIR	APBD
33	PUDAKPAYUNG	GENK	2023	BANJIR	APBD
34	TAMBAKREJO	GENK	2023	BANJIR	APBD
35	PENGGARON KIDUL	PEDURUNGAN	2024	BANJIR	APBD

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2024

Program ini merujuk pada kerangka ketangguhan masyarakat terhadap bencana di tingkat internasional yang dikembangkan berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo. Kerangka tersebut mencakup beberapa aspek penting, yaitu analisis risiko, peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan, manajemen risiko dan pengurangan tingkat kerentanan, serta kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana. Untuk mencapai kondisi ideal yang mencakup seluruh aspek tersebut tentu bukan hal yang mudah bagi setiap kelurahan. Sejalan dengan hal tersebut, Kelurahan Tangguh Bencana dikategorikan ke dalam tiga tingkat, yaitu Pratama, Madya, dan Utama.

Program ini telah melalui berbagai tahapan, mulai dari pelatihan kesiapsiagaan masyarakat, pembentukan forum relawan bencana, penyusunan peta risiko, hingga penyusunan rencana kontinjensi di tingkat kelurahan. Pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) di Kota Semarang menunjukkan bahwa program ini tidak lagi berada pada tahap perencanaan, melainkan telah diimplementasikan sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dan dampaknya dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap Program KATANA menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antar lembaga, pelaksanaan program di tingkat lokal, serta partisipasi masyarakat

dalam setiap tahapan kegiatan (Hidayatullah, Purnaweni, & Yuwono, 2022). Penelitian ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan Program KATANA di Kota Semarang dengan menilai aspek efektivitas program, kendala yang dihadapi dalam implementasi, serta kontribusinya dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan Program KATANA serta dampaknya terhadap upaya mitigasi bencana di Kota Semarang. Penelitian ini akan mengambil beberapa kelurahan dengan tingkat ketangguhan yang relatif baik sebagai sampel untuk menilai keberhasilan implementasi program. Melalui hasil evaluasi tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan program sebagai dasar perbaikan sistem tata kelola kebencanaan di tingkat lokal.

Evaluasi kebijakan publik tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses pelaksanaannya (Nasution, 2023). Dalam konteks Program KATANA, proses pelaksanaan yang baik harus mencerminkan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sehingga penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan Program Katana di Kota Semarang serta tingkat keterpaduannya dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Semarang?
2. Bagaimana dampak implementasi Program Katana terhadap peningkatan kapasitas mitigasi bencana dan ketangguhan masyarakat di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap institusi pada dasarnya menginginkan agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Berdasarkan uraian analisis di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) di Kota Semarang, termasuk melihat dampak yang dihasilkan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas program tersebut dengan mengacu pada ketangguhan bencana masyarakat di Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, rekomendasi, serta dukungan bagi BPBD Kota Semarang terkait pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) di Kota Semarang, sehingga upaya penanggulangan bencana di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

dapat menjadi bahan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai dalam melakukan penelitian terkait evaluasi program maupun kebijakan pemerintah, serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji terkait evaluasi program atau kebijakan pemerintah.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam memperluas pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan kajian evaluasi program dan kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana pada tingkat kelurahan di Kota Semarang.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Program Katana maupun penanggulangan bencana berbasis masyarakat telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Sebagian penelitian menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam manajemen bencana, yang menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh dukungan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. Selain itu, terdapat penelitian yang berfokus pada implementasi program di tingkat lokal, mencakup peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Program Katana mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sebagai bentuk output kebijakan, meskipun masih dihadapkan pada

berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia serta belum meratanya pelaksanaan program di berbagai wilayah.

Di sisi lain, terdapat penelitian yang mengkaji pelaksanaan Program Katana melalui pendekatan evaluasi kebijakan untuk menilai kinerja program secara lebih komprehensif. Evaluasi tersebut mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana sebagai bentuk outcome kebijakan, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek kelembagaan, pendanaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, efektivitas program juga dipengaruhi oleh tingkat pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengurangan risiko bencana.

Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementasi program atau evaluasi secara umum, dan belum secara spesifik mengkaji pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang komprehensif. Padahal, dalam konteks kebijakan publik, evaluasi tidak hanya menilai keberhasilan program dalam mencapai tujuan (efektivitas), tetapi juga mencakup aspek efisiensi, kecukupan program dalam menjawab

kebutuhan, pemerataan manfaat (kesamaan), responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta ketepatan kebijakan dalam menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pelaksanaan Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Semarang melalui pendekatan evaluasi kebijakan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan, bagaimana efisiensi pelaksanaannya, serta bagaimana dampak dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Dengan menggunakan kriteria evaluasi dari William N. Dunn, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan objektif mengenai kinerja program, baik dari sisi proses maupun hasil, sehingga dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Tabel 1. 4
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Teori dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Nidaan Khafian/ 2023	The Role Of Collaborative Governance In Indonesian Disaster Management Peran Tata Kelola Kolaboratif Dalam Manajemen Bencana Di Indonesia	Penelitian ini menggunakan konsep tata kelola yang melibatkan lembaga publik dan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif secara formal untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola kebijakan, program, serta aset publik. Selain itu, digunakan teori Manajemen Bencana untuk menilai upaya pencegahan, pengurangan dampak, penanganan, dan rekonstruksi bencana	Tata kelola kolaboratif berperan penting dalam manajemen kebencanaan dan mitigasi darurat karena dampak bencana yang luas dan signifikan terhadap masyarakat, sehingga diperlukan koordinasi dan kepemimpinan kolektif antar pemangku kepentingan dalam pemulihan bencana. Penerapannya dilakukan pada tahap prabencana melalui pembentukan masyarakat tangguh dengan melibatkan lembaga pemerintah dan nonpemerintah secara formal, serta pada tahap pascabencana melalui pemulihan berbasis

No.	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Teori dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
			<p>sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana.</p> <p>Metode pada penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan dan data sekunder. mengeksplorasi peran tata kelola kolaboratif dalam manajemen bencana Indonesia</p>	<p>masyarakat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pasca bencana.</p>
2.	Rahmasari Ramadhana, Muhammad Husein Maruapey, Rusliandy / 2025	Implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana dalam Sistem Peringatan Dini Bencana di Kota Bogor	<p>Penelitian ini menggunakan landasan kebijakan Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD di Kota Bogor dengan sasaran kelurahan dan masyarakat. Hingga saat ini, dari 68 kelurahan di 5 kecamatan, baru 24 kelurahan yang telah mengikuti pelatihan dan membentuk Forum Kelurahan Tangguh Bencana.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	<p>Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Bogor terbukti meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat melalui sistem peringatan dini yang terintegrasi, sehingga respons terhadap potensi bencana lebih cepat dan mampu menekan korban jiwa serta kerugian material. Keberlanjutan program ini didukung oleh peran pemerintah, partisipasi masyarakat, serta penguatan infrastruktur dan teknologi, meskipun masih dihadapkan pada kendala keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, akses teknologi yang belum merata, kesenjangan pelatihan dan tantangan geografis di beberapa kelurahan</p>
3.	Diva Aprilia Anggraini / 2024	Optimalisasi Program Kelurahan Tangguh Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	<p>Penelitian ini menggunakan Teori optimalisasi dari Siringoringo (2005) untuk mengukur keoptimalan program kelurahan tangguh bencana di Kota Semarang ini</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Semarang belum berjalan optimal, meskipun telah terbentuk 22 kelurahan yang menjalankan tugas dalam penanggulangan banjir. Ketidakefektifan ini disebabkan masih adanya kelurahan yang belum aktif, keterbatasan</p>

No.	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Teori dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
			dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan informan, yang terdiri dari pimpinan dan pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang serta lima Ketua Kelurahan Tangguh Bencana.	anggaran, serta lemahnya koordinasi, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat agar fungsi Kelurahan Tangguh Bencana dapat berjalan lebih responsif dan efektif.
4.	Rimala Salwa (2019)	Evaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana Di Kota Padang	<p>Penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Bencana Djohanpoetro (dalam Alhadi, 2014) yang menekankan upaya pra bencana untuk menghindari kerugian, pengurangan dampak fisik, ekonomi, dan lingkungan, penurunan kerugian masyarakat terdampak, perbaikan kondisi pascabencana, serta percepatan pemulihan agar masyarakat dapat kembali pulih. Analisis Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Padang dilakukan menggunakan indikator Evaluasi Program CIPP (Context, Input, Process, Product) menurut Stufflebeam (dalam Wakhinuddin S., 2009).</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang, belum berjalan optimal akibat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, keterbatasan dana yang seharusnya bersumber dari APBD, serta minimnya sumber daya manusia aparatur kelurahan. Meskipun demikian, program ini memiliki kekuatan berupa jumlah relawan Kelompok Siaga Bencana yang memadai dan kemampuan administratif aparatur kelurahan dalam berkoordinasi dengan BPBD. Kelemahan utama program terletak pada keterbatasan anggaran dan fasilitas, sementara peluangnya berasal dari strategi kelurahan dalam menjalankan program, dan ancamannya adalah rendahnya kapasitas serta kesadaran masyarakat di wilayah rawan bencana.
5.	Fadlurrahman Fiqi Salman / 2023	Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh	Dengan menggunakan indikator teori evaluasi berdasarkan Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana komponen-	Pelaksanaan Program Destana Akar – Akar yang berjalan hampir empat tahun telah dilakukan sesuai dengan Pedoman

No.	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Teori dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
		Bencana Desa Akar- Akar Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023	komponen Program yang perlu dievaluasi adalah (1) Legislasi, (2) Perencanaan, (3) Kelembagaan, (4) Pendanaan, (5) Pengembangan Kapasitas, dan (6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Metode yang digunakan penelitian pada artikel ini adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana secara khusus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.	Destana, yang tertuang dalam PerKa BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tanggguh Bencana. Namun ada beberapa hambatan yang paling dirasakan adalah mayoritas anggota TSBD yang tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh TSBD dan keterbatasan dana dari Pemerintah Desa namun tidak terlalu signifikan karena TSBD Akar – Akar juga mendapat dukungan sumber daya maupun teknis dari pihak luar, seperti Lembaga non-profit selaku fasilitator dan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/BPBD KLU
6.	Wirasto Tri A, Sri Suwitri, Margaretha S, Dyah Hariani /2019	Evaluasi Dampak Penyediaan Ruang Teruka Hijau Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (Kajian Pasal 29, Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)	Teori yang digunakan teori Pelaksanaan dan teori dampak evaluasi kebijakan oleh Finsterbusch and Motz (dalam Samodra) Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif Awibawa, 1994); Dampak individu, lingkungan, ekonomi, organisasi dan kelompok, masyarakat, dan sosial budaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek komunikasi yang masih bersifat formalitas antar aktor serta minimnya aktivitas program di lapangan, meskipun didukung oleh sumber daya yang cukup dan struktur birokrasi yang sudah sesuai. Dari sisi evaluasi kebijakan, program dinilai cukup efektif dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat, efisien dalam pelaksanaannya, serta memiliki pemerataan yang baik melalui keterlibatan relawan di setiap wilayah. Selain itu, program juga menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik terhadap kebutuhan masyarakat.
7.	Naufalarii q Vadio	Evaluasi Implementas	Penelitian ini mengkaji evaluasi implementasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

No.	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Teori dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
	Samsuddin, Sri Roekminiati, Ika Devy Pramudiana Sapto Pramono, Aris Sunarya/ 2024	i Kebijakan Program Desa Tangguh Bencana Dalam Perspektif Hexahelix Assessment di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo	Program Desa Tangguh Bencana di Desa Kepuhkiriman dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, pendekatan Hexahelix Assessment, serta evaluasi kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Pemerintah Distrik Okhika, Kabupaten Pegunungan Bintang, telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance dengan sangat baik. Dalam aspek transparansi, pemerintah distrik dinilai mampu menjalankan peran sebagai pelayanan publik melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat dan internal pegawai. Dari sisi penegakan hukum, kepala distrik beserta staf menunjukkan ketaatan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meminimalisir kekurangan yang ada. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga terlaksana dengan sangat baik, di mana pemerintah distrik secara konsisten menunjukkan tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat.
8.	Ficky Adikurniawan, Inggit Fandayati / 2023	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) Di Kelurahan Tamanan Dan Lirboyo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri	Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode survei partisipatif, ceramah, diskusi, latihan/praktik langsung, observasi, dan evaluasi.	Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana. Hasil pengkajian risiko bencana partisipatif di Kelurahan Tamanan dan Lirboyo menunjukkan bahwa ancaman utama adalah banjir dengan tingkat risiko tergolong sedang. Upaya mitigasi dilakukan melalui penyusunan peta risiko bencana, sistem peringatan dini, rencana evakuasi, serta rencana kontinjensi. Kegiatan ini juga

No.	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Teori dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
				meningkatkan pengetahuan masyarakat serta mendorong peran aktif Forum Pengurangan Risiko Bencana dan relawan dalam penanggulangan bencana.
9.	Ach. Apriyanto Romadhann, Taufik Rahman, Iradhad Taqwa Sihidi, Krishno Hadi/ 2022	Implementasi Kelurahan Tangguh Bencana Di Bandungrejosari Kota Malang	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kapasitas dari Merilee S. Grindle. Kapasitas diartikan sebagai kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan organisasi lain. Grindle (dalam Wahyudi, 2016:25) menyebutkan bahwa kapasitas terdiri dari tiga dimensi, yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi institusi atau birokrasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif	Implementasi Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Bandungrejosari memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penanganan bencana. Sebelum program ini dibentuk, masyarakat belum memahami langkah mitigasi dan masih bergantung pada BPBD Kota Malang. Melalui edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kebencanaan, masyarakat menjadi lebih memahami cara menghadapi bencana secara mandiri. Pelaksanaan program ini juga berhasil meningkatkan kesiapsiagaan serta kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sebagai upaya mitigasi bencana.
10.	Susilastuti, Syamsul Maarif, Kusuma, Anwar Kurniadi/ 2025	Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana	Penelitian oleh Susilastuti dkk. (2025) mengkaji Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesiapsiagaan bencana dengan menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan komunitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Destana berperan penting sebagai model pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan terstandar dalam meningkatkan kapasitas serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Keberhasilan program ini didukung oleh adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, serta kebijakan nasional, termasuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Desa Tangguh Bencana. Selain itu, program ini

No.	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Teori dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
			dokumen, yang mencakup kebijakan nasional, standar nasional, publikasi ilmiah, serta laporan lembaga terkait.	dinilai mampu memperkuat kelembagaan lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana, sehingga menjadi dasar penting dalam membangun ketangguhan komunitas secara berkelanjutan.

1.6 Pemikiran Teoritis

1.6.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah sebuah prosedur atau kegiatan yang dikerjakan secara teratur dan merupakan tahap akhir di dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Di dalam pengoprasian sebuah program maka evaluasi adalah hal yang wajib dibutuhkan (Prabowo et al., 2022). Menurut Subarsono (2021), evaluasi merupakan suatu aktivitas menilai kinerja dari sebuah kebijakan. Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen mendefinisikan evaluasi adalah serangkaian proses mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengaplikasikan standar kriteria untuk menilai apakah objek-objek yang dievaluasi telah memenuhi standar kelayakan sehubungan dengan kriteria yang ditentukan tersebut (Faizin, Kusumaningrum, 2023)

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu kebijakan telah berjalan dengan baik serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sementara itu, evaluasi kebijakan adalah suatu usaha menganalisis guna mencari kebenaran terhadap program yang berasal dari pihak

berwenang melalui substansi/isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut sehingga mampu menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai pencapaian suatu program atau kebijakan (Warman, Komariyah & Kaltsum, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kinerja suatu kebijakan atau program publik. Proses ini mencakup penilaian terhadap substansi kebijakan, proses pelaksanaannya, serta hasil dan dampak yang ditimbulkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menyediakan informasi yang objektif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Evaluasi program atau kebijakan memiliki beberapa tujuan, menurut Subarsono (2021) tujuan evaluasi sebagai berikut :

- a. Mengetahui tingkat kinerja kebijakan. Memiliki maksud memberikan gambaran seberapa baik tujuan program atau kebijakan telah tercapai.
- b. Mengetahui efisiensi dari kebijakan. Dapat mengetahui manfaat dan biaya dari program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- c. Menilai tingkat keluaran atau policy outcome, melalui tahap ini (penilaian) kita mengetahui seberapa besar dan seberapa baik kualitas dari pengeluaran kebijakan
- d. Mengetahui impact dari kebijakan, apakah kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik atau buruk bagi sasaran.

- e. Untuk mengetahui penyimpangan dari suatu kebijakan atau program yang kemungkinan bisa terjadi, hal tersebut dapat dilakukan melalui cara mencocokkan sasaran/tujuan dengan apa yang sudah (target) dicapai.
- f. Untuk dijadikan pertimbangan agar kebijakan selanjutnya dapat lebih baik.

Berdasarkan tujuan evaluasi menurut Subarsono, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai mana program Kelurahan Tangguh Bencana telah tercapai sesuai dengan tujuan dan perubahan kelompok sasaran. Evaluasi kebijakan dan model evaluasi saling berkaitan karena model evaluasi digunakan sebagai kerangka kerja dalam evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu kebijakan. Dengan menggunakan model evaluasi yang tepat, hasil evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis dan objektif mengenai keberhasilan atau kekurangan suatu kebijakan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Model evaluasi ini dikemukakan oleh William N. Dunn dan dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Nugroho (2009). Dunn mengidentifikasi enam kriteria untuk mengevaluasi suatu program, yaitu:

- a. Efektivitas mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai target yang telah ditentukan, yang umumnya dinilai berdasarkan hasil capaian maupun dampak ekonomi yang dihasilkan.
- b. Efisiensi merujuk pada pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai target tertentu dengan meminimalkan penggunaan input atau usaha.

- c. Kecukupan, menilai apakah kebijakan dapat memenuhi kebutuhan atau tujuan yang menjadi dasar perumusannya.
- d. Kesamaan, berkaitan dengan keadilan dalam distribusi manfaat dan beban kebijakan di antara berbagai kelompok masyarakat.
- e. Responsivitas, Mengukur seberapa efektif suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan serta aspirasi kelompok masyarakat tertentu.
- f. Ketepatan, menilai relevansi tujuan kebijakan serta kekuatan asumsi yang mendasarinya dalam mencapai hasil yang diharapkan.

1.6.2 Evaluasi Dampak

Dalam kebijakan terdapat dua jenis hasil yang dihasilkan, yaitu keluaran (output) dan dampak (impact). Keluaran kebijakan mencakup berbagai bentuk barang, layanan, maupun sumber daya yang diberikan kepada pihak yang menjadi sasaran atau penerima manfaat. Sementara itu, dampak kebijakan merujuk pada perubahan perilaku atau sikap yang muncul sebagai akibat dari keluaran kebijakan tersebut.

Output adalah keluaran langsung dari kegiatan sebuah program, sedangkan outcome merupakan manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran selama atau setelah keterlibatan mereka dalam program. Dampak (impact) mencakup efek jangka panjang dari manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, yang dapat mempengaruhi pengetahuan, keahlian, perilaku, sikap, nilai, kondisi, atau status mereka. Dampak ini merupakan konsekuensi lebih luas bagi masyarakat akibat dari implementasi kebijakan tersebut.

Samodra Wibawa (1994) menjelaskan, evaluasi dampak kebijakan merupakan kegiatan memberikan penilaian dan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan proses pelaksanaannya. Selain itu menurut Rossi dan Freeman dalam Parson (2008) mengungkapkan bahwa penilaian atas dampak berfungsi untuk mengetahui apakah intervensi tersebut memberikan efek yang diinginkan atau tidak. Sedangkan Menurut Widodo (2018), riset evaluasi dampak (impact evaluation) berfokus pada sejauh mana suatu kebijakan mampu menghasilkan perubahan yang diharapkan (intended impacts). Tujuan dari riset ini adalah untuk menguji efektivitas kebijakan atau proyek dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, setiap program atau kebijakan didesain untuk memecahkan suatu masalah, dimana pasti terdapat unit yang terdampak atas suatu program atau kebijakan tersebut. Finterbusch dan Motz dalam Samodra Wibawa (1994) menetapkan unit-unit sosial yang terdampak atas program atau kebijakan sebagai berikut :

a. Dampak Individu

Setiap program atau kebijakan pada dasarnya akan menimbulkan dampak bagi berbagai pihak. Pihak yang pertama kali merasakan dampak tersebut adalah individu atau perorangan sebagai bagian dari masyarakat. Dampak pada tingkat individu dapat dilihat melalui beberapa aspek penting, yaitu aspek biologis yang berkaitan dengan kondisi kesehatan individu, aspek psikologis yang berhubungan dengan tingkat kenyamanan atau stres masyarakat terhadap

pelaksanaan kebijakan, aspek personal dan sosial yang berkaitan dengan motivasi serta perubahan dalam aktivitas organisasi, aspek ekonomi yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta aspek lingkungan yang berhubungan dengan kesempatan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungannya.

b. Dampak Organisasi

Dampak organisasi mengacu pada pengaruh yang dihasilkan dari suatu kebijakan pemerintah terhadap pencapaian tujuan organisasi yang selaras dengan visi dan misinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut juga menggambarkan sejauh mana program yang dijalankan memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian bagi organisasi.

c. Dampak Lembaga dan Sistem Sosial

Lembaga atau sistem sosial merupakan salah satu unsur yang dapat terpengaruh oleh pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan yang terjalin antara lembaga serta sistem sosial dengan organisasi yang menjalankan program tersebut. Selain itu, penting pula untuk mengetahui bagaimana pandangan lembaga sosial kemasyarakatan terhadap pelaksanaan program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

d. Dampak Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan pelaksanaan suatu program kebijakan, karena mereka berinteraksi secara langsung dengan implementasi kebijakan tersebut. Dampak kebijakan terhadap masyarakat dapat

dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat. Dampak tersebut meliputi empat aspek utama, yaitu lingkungan hidup, kondisi ekonomi, pendidikan dan keagamaan, serta sosial budaya.

1.7 Operasional Konsep

Dalam penelitian ini operasional konsep dibuat penulis dengan menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu evaluasi kebijakan. Penerapan evaluasi kebijakan tersebut dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan. Menurut UNDP setiap kegiatan Program diarahkan agar dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memanfaatkan sumber yang tersedia. Sedangkan teori evaluasi dampak menurut Finterbusch dan Motz dalam Samodra Wibawa (1994) menambahkan dengan dampak individu, organisasi, lembaga dan sistem sosial dan masyarakat.

Tabel 1. 5
Indikator Penelitian

Teori	Konsep/Kriteria	Indikator
Evaluasi Kebijakan	Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu kebijakan telah berjalan dengan baik serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya	<p>1. Efektivitas mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai target yang telah ditentukan, yang umumnya dinilai berdasarkan hasil capaian maupun dampak ekonomi yang dihasilkan.</p> <p>2. Efisiensi merujuk pada pemanfaatan sumber daya secara optimal untuk mencapai target tertentu dengan meminimalkan penggunaan input atau usaha.</p> <p>3. Kecukupan menilai apakah kebijakan dapat memenuhi kebutuhan atau tujuan yang menjadi dasar perumusannya.</p> <p>4. Kesamaan</p>

Teori	Konsep/Kriteria	Indikator
		<p>berkaitan dengan keadilan dalam distribusi manfaat dan beban kebijakan di antara berbagai kelompok masyarakat.</p> <p>5. Responsivitas Mengukur seberapa efektif suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan serta aspirasi kelompok masyarakat tertentu.</p> <p>6. Ketepatan menilai relevansi tujuan kebijakan serta kekuatan asumsi yang mendasarinya dalam mencapai hasil yang diharapkan</p>
Evaluasi Dampak kebijakan	Evaluasi adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi untuk menilai suatu objek berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek tersebut.	<p>1. Dampak Individu Pada dampak individu terdapat lima aspek penting yang berpengaruh yaitu, biologis (berkaitan pada kesehatan individu), psikologis (bergantung pada kesenangan atau tingkat stress masyarakat terhadap pelaksanaan program kebijakan), personal dan soial (berkaitan dengan motivasi, dan bertambah/kurangnya kegiatan organisasi), ekonomi (bergantung pada tingkat kesejahteraan), dan lingkungan (bergantung pada kesempatan warga mempertahankan lingkungan.</p> <p>2. Dampak Organisasi Dampak organisasi dimaksudkan sebagai pengaruh dari Program Katana dalam mencapai tujuan yang selaras dengan visi dan misi BPBD.</p> <p>3. Dampak lembaga dan sistem sosial Lembaga atau sistem sosial merupakan salah satu pihak yang terdampak oleh suatu program kebijakan. Hal ini terlihat dari adanya hubungan yang terbentuk antara lembaga dan sistem sosial dengan organisasi pelaksana</p> <p>4. Dampak Masyarakat Dampak pada masyarakat mencakup empat aspek utama, yaitu lingkungan hidup, kondisi ekonomi, pendidikan dan keagamaan, serta sosial budaya.</p>

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Desain penelitian merupakan perencanaan yang disusun secara sistematis oleh peneliti agar proses penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Desain penelitian adalah suatu rencana tentang bagaimana mengumpulkan dan mengolah berbagai data supaya penelitian yang diharapkan dapat tercapai (Sujarweni, 2014). Melalui desain penelitian yang tepat, peneliti mampu melakukan penelitian sesuai arah yang diharapkan.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin 1997 (Sujarweni, 2014), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan pengukuran ataupun melalui berbagai prosedur statistik. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kehidupan bermasyarakat, tingkah laku, sejarah, fungsionalisasi sebuah organisasi, aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Bogdan dan Taylor (1992) menjelaskan bahwa prosedur penelitian kualitatif mampu menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun ucapan, serta perilaku yang dapat diamati dari suatu organisasi, kelompok, ataupun individu dalam keadaan tertentu melalui pengkajian yang utuh, holistik, dan komprehensif (Sujarweni, 2014).

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi sosial yang dicirikan dengan adanya pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diamati oleh penulis (Nasution, 2003). Situs penelitian ini adalah tempat dimana penulis dapat memperoleh informasi berupa

data dan hal lain yang diperlukan dalam penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Gajahmungkur, Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Meteseh serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang untuk memperkuat sumber atau data dari hasil analisis. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan klasifikasi Organisasi Katana di Kota Semarang. Kelurahan Gajahmungkur sebagai kelurahan yang tergolong pada tingkat tertinggi berdasarkan syarat kesiapan dalam kesiagaan bencana yakni tingkat utama. Namun berbanding terbalik dengan Kelurahan Rowosari yang cukup sering terjadi bencana namun, masih terklasifikasi tingkat pratama. Terakhir kelurahan Meteseh cukup sering terjadi bencana namun untuk data klasifikasi dari katananya masih belum ada, sehingga penulis menjadikan tiga kelurahan tersebut menjadi sampel dalam penelitian. Faktor-faktor tersebut sangat mendukung dalam topik penelitian yang diangkat yakni tentang Evaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) berdasarkan evaluasi kebijakan.

1.8.3 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data deskriptif yang mencakup peristiwa, kejadian, maupun gejala yang dapat dianalisis. Data kualitatif tersebut disajikan dalam bentuk teks, kata-kata, serta gambar yang dapat menggambarkan suatu peristiwa secara lebih mendalam..

1.8.1 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini yaitu berupa orang yang dijadikan sebagai narasumber. Untuk mengetahui bagaimana dari pelaksanaan program Katana berdasarkan PerKa

BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kota Semarang maka dibutuhkan informasi dari internal organisasi yakni anggota bidang satu BPBD Kota Semarang selaku bidang bertanggung jawab dalam pencegahan dan kesiapsiagaan. Bukan hanya itu, peneliti juga membutuhkan subjek penelitian lain yang berasal dari beberapa organisasi perangkat daerah di Kota Semarang yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Katana. Diantaranya yaitu Kepala Kelurahan dari Kelurahan yang sudah berada ditingkat klasifikasi yang paling memenuhi sesuai data BPBD, anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) atau relawan dan warga setempat yang berada di kelurahan tersebut sebagai pelengkap dari Pelaksanaan Program Katana di Kota Semarang.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua jenis data tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama tanpa melalui pihak perantara. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung di lapangan guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer melalui kegiatan wawancara dengan narasumber, observasi di lapangan, serta dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara, yang umumnya berasal dari sumber-sumber yang telah tersedia

sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berasal dari instansi terkait.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas apabila dilakukan secara cermat dan benar. Terdapat tiga teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Dalam proses ini, penulis menggunakan dua bentuk wawancara. Pertama, wawancara terstruktur yang ditujukan kepada Lurah, pihak BPBD, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) atau pengurus Katana, serta masyarakat kelurahan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Katana.

Sebelum wawancara dilaksanakan, penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman agar proses wawancara berjalan lebih terarah. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara mendalam tanpa menggunakan pedoman pertanyaan yang baku, sehingga prosesnya lebih fleksibel dan memungkinkan dilakukan secara berulang. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada tiga orang warga dari kelurahan yang telah menerapkan Program Katana sebagai perwakilan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui pandangan mereka mengenai keberhasilan pelaksanaan program tersebut di wilayahnya.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan serta memiliki pemahaman terhadap topik penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

b. Observasi atau pengamatan

Penulis melakukan pengamatan langsung di Kelurahan pelaksana program dan di BPBD Kota Semarang untuk mengetahui kondisi dan fakta terkait pengelolaannya. Objek yang diamati adalah pencapaian hasil kerja dari BPBD dan Lurah dalam pelaksanaan program Katana, yaitu penulis akan mengamati tentang kondisi suasana, infrastruktur, sarana dan prasarana serta pendanaan untuk pelaksanaan program.

c. Dokumentasi

Informasi terkait penelitian dapat diperoleh melalui buku, dokumen, dan gambar yang mampu melengkapi data yang dibutuhkan peneliti. Dokumentasi dilakukan untuk menggambarkan peristiwa yang telah terjadi, sehingga peneliti mampu memiliki kredibilitas yang terjamin sesuai fakta yang ada di lapangan. Dokumentasi dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk studi pustaka, foto saat penulis melakukan wawancara, dan dokumen yang diperoleh dari narasumber seperti standar operasional prosedur terkait pelaksanaan Program Katana oleh Pemerintah Kota Semarang.

1.8.4 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Mudjiarahardjo (Sujarweni, 2014) analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, serta mengkategorikan data sehingga peneliti dapat menganalisis dan memperoleh jawaban dari masalah yang sedang diteliti. Proses analisis data dapat dilakukan baik selama kegiatan pengumpulan data berlangsung maupun setelah seluruh data terkumpul. Apabila peneliti menilai bahwa jawaban yang diperoleh dari narasumber belum memenuhi kebutuhan penelitian, maka peneliti dapat kembali mengajukan pertanyaan kepada narasumber hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh dan dianggap cukup untuk menjawab permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, dimana aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terjadi secara terus menerus sampai peneliti memperoleh jawaban dari penelitiannya (Sugiyono, 2018). Berikut merupakan alur tahapan dari proses pengumpulan dan interpretasi data menurut model Miles dan Huberman yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penulis:

1. Pengumpulan Data

Tahap awal yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan data. Data berupa tulisan, hasil wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan yang dikumpulkan menjadi satu. Setelah penulis mengumpulkan semua data yang telah diperoleh, maka dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian dirangkum untuk menghasilkan laporan data yang lebih rinci. Penyusunan

laporan dilakukan berdasarkan data yang telah direduksi, dirangkum, serta difokuskan pada hal-hal yang dianggap paling penting. Dengan cara tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hasil pengamatan yang dilakukan. Selain itu, proses reduksi data juga membantu peneliti dalam mempermudah pencarian data tambahan apabila masih diperlukan.

3. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, penulis harus mengkategorisasikan data-data yang sesuai dengan pokok permasalahan, supaya mempermudah dalam melihat pola hubungan antar data. Penulis harus bisa menjelaskan keterkaitan antara data satu dengan data yang lain. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif.

4. Penyimpulan

Tahap penyimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan hasil dari proses reduksi data dan penyajian data yang sebelumnya telah dirumuskan dalam bentuk kesimpulan sementara. Kesimpulan yang diperoleh dari setiap tahapan penelitian akan memiliki dasar yang semakin kuat dan jelas. Hasil kesimpulan tersebut dapat menjadi temuan baru yang memberikan penjelasan terhadap suatu objek yang sebelumnya belum dipahami secara jelas. Setelah penelitian dilakukan, objek yang diteliti menjadi lebih jelas untuk dipahami. Melalui proses penarikan kesimpulan ini, peneliti dapat menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

1.8.5 Kualitas Data

Data dapat dinyatakan valid apabila tidak ditemukannya perbedaan antara data hasil penelitian dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Untuk menguji kualitas dan validitas data yang diperoleh, penulis akan menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data (Sugiyono, 2015) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara penggabungan berbagai data dan sumber yang telah diperoleh selama proses penelitian dilakukan. Triangulasi data dapat diartikan sebagai teknik pengecekan data dengan berbagai cara dan waktu. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan narasumber yang kemudian hasil wawancara tersebut dipadukan dengan isi suatu dokumen yang relevan. Penulis juga dapat membandingkan hasil wawancara antara narasumber satu dengan narasumber lainnya.